

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MENGADILI POKOK PERKARA
PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENYATAKAN TIDAK
SAHNYA SURAT PENETAPAN TERSANGKA DITINJAU
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

William Wongso

120115260

Ilmu Hukum, Universitas Surabaya

Pembimbing : Dr. Suhartati., S.H., M.Hum.

Dr. Daniel Djoko Tarliman S.H., M.S.

ABSTRAK

Praperadilan di Indonesia pada tataran praktek dan pengaturannya sering menimbulkan banyak permasalahan hukum, hal tersebut didasari semakin berkembang dan kompleksnya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang kemudian menimbulkan berbagai penafsiran dari Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang khususnya terkait dengan praperadilan. Salah satu permasalahan yang menjadi problematika hukum di Indonesia adalah terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL yang dijadikan studi kasus pada penelitian ini. Permasalahan hukum yang terjadi pada studi kasus tersebut adalah terkait implementasi putusan praperadilan yang tidak dipatuhi oleh Hakim. Pada putusan tersebut penetapan tersangka oleh penyidik dinilai tidak sah sehingga seharusnya menimbulkan akibat hukum bahwa pokok perkara tidak dapat dilanjutkan karena proses penegakan hukum formil yang tidak tepat. Namun pada faktanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat tetap memeriksa dan mengadili pokok perkara pada 16 Mei 2018 dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Permasalahan hukum tersebut timbul berkenaan dengan kepastian hukum terhadap undang-undang yang kurang diterapkan dengan tepat sehingga merugikan hak-hak terdakwa.

Kata kunci : Hukum, Kewenangan Hakim, Praperadilan

**THE AUTHORITY OF THE JUDGE IN THE PROSECUTION OF THE
SUBJECT OF THE PRE-TRIAL DECISION STATING NOT THE VALIDITY
OF THE SUSPECTED LETTER OF APPOINTMENT IS REVIEWED
BASED ON THE CRIMINAL CODE**

William Wongso

120115260

Law Science, University of Surabaya

Contributor : Dr. Suhartati., S.H., M.Hum.

Dr. Daniel Djoko Tarliman S.H., M.S

ABSTRACT

The pretrial in Indonesia on the level of practice and its arrangement often raises many legal issues, it is based on growing and complex problems that exist in the community which then raises various The Constitutional Court's interpretation of the legislation, especially related to pretrial. One of the problems that become legal problems in Indonesia is related to the decision of the South Jakarta District Court number 40/Pid. Pre/2018/PN JKT. The CELL was used as a case study on this study. The legal issues that occur in the case study are related to the implementation of the pretrial decision not complied by the judge. The ruling on the decision of the suspect by the investigator is judged to be invalid so that it should cause legal consequences that the subject cannot continue due to improper enforcement of the formyl law. But in fact, the central Jakarta corruption criminal Court still examined and prosecute the subject matter on 16 May 2018 with the agenda reading the indictment. The legal issues arise with regard to the legal certainty of laws that are poorly applied with the tapat to harm the rights of defendants.

Keywords: Law, Authority of Judges, Pretrial.